



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA  
RUANG**

**KABUPATEN KULON PROGO  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2022 dapat terwujud. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017-2022.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Tahun 2022.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan menjadi pedoman bagi Dinas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2022.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	15
2.4. Reviuw terhadap RKPD.....	15
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	17
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>24</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (*guidelines*) dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Pertanahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo.

Nomen-klatur kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja (renja), selain mengacu kepada Matrik RPJM Daerah juga harus mengacu kepada Permendagri 59 Tahun 2007 maupun Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Sehingga diharapkan dengan disusunnya rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo ini, didapatkan panduan dan arahan yang jelas bagi penjarangan usulan kegiatan untuk tahun 2022 pada urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan sebagai bahan masukan dalam Penyusunan Rencana Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 maupun Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bahan dasar Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan perencanaan dan penganggaran OPD adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  - 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 7). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009)
  - 8). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
-

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3)
- 9). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 10). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032;
  - 11). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  - 12). Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019;
  - 13). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019;
  - 14). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  - 15). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai pedoman dan arahan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2022 urusan penataan ruang dan urusan pertanahan serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Tersedianya pedoman penyusunan strategi pencapaian target kinerja urusan Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Tersedianya arahan program dan kegiatan beserta beban target sasaran kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2022 sesuai dengan Perubahan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022;
3. Tersedianya pedoman dan bahan sinergitas program dan kegiatan dalam proses pemaduserasian usulan dalam pelaksanaan forum OPD urusan Pertanahan dan Penataan Ruang, serta urusan lain yang terkait;

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika bahasan dari Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 2022, terdiri dari :

- Bab I** : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan;
- Bab II** : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
- Bab III** : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- Bab IV** : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
- Bab V** : Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**



## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
    - 2. Penyediaan Jasa Keuangan
    - 3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
  - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
    - 1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
    - 2. Penyusunan Laporan Keuangan
    - 3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
  - c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD Perkantoran
    - 1. Pengadaan sarana dan prasaran perkantoran
    - 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
    - 3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
  - d. Program Pengelolaan Pertanahan
    - 1. Sertifikasi tanah masyarakat yang sudah dibebaskan oleh pemda
    - 2. Identifikasi dan Inventarisasi Pertanahan
    - 3. Penataan Tanah Masyarakat
    - 4. Penyediaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kepentingan Umum
    - 5. Penyelesaian permasalahan pertanahan
    - 6. Pengelolaan Data Base Pertanahan
  - e. Program Perencanaan Penataan Ruang
    - 1. Penyusunan rencana tata ruang dan rencana rinci
    - 2. Penyusunan RTBL
    - 3. Penyebarluasan informasi penataan ruang kabupaten

- f. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang
  - 1. Penyelenggaraan TKPRD
  - 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - 3. Audit Pemanfaatan Ruang
  - 4. Pengelolaan database dan peta tata ruang
- g. Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
  - 1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- h. Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
  - 1. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Tanah Desa
  - 2. Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa
- i. Program Perencanaan Tata Ruang Strategis Kasultanan dan Kaadipaten
  - 1. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
  - 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021, mengacu pada APBD tahun 2021 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam table 2.1 berikut:

---

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\*

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									(TW 1 tahun 2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
	Program penyelenggaraan Penataan ruang	Cakupan perencanaan penataan ruang	77,2	74,68	81,95	36,23	0,44	72,45	183,36	2,38
	Kegiatan penetapan RTRW dan RRTR Kab/Kota									

				Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kab/kota	Persetujuan substansi RDTR	18	18	18	0	0	1	19	1,06
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penyelenggaraan Penataan ruang									
				Kegiatan penetapan RTRW dan RRTR Kab/Kota									
				Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi informasi penataan ruang	152	2	1	4	4	4	10	0,07
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penyelenggaraan Penataan ruang									
				Kegiatan penetapan RTRW dan RRTR Kab/Kota									
				sub kegiatan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dokumen RTBL	32	32	32	1	0,03	0	33	1,03

			Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelenggaraan Penataan ruang									
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota									
			sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang	317	0	289	289	1	150	439	1,38
			Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelenggaraan Penataan ruang									
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota									
			Sistem informasi penataan ruang	Penyusunan Database	12	0	9	2	0,22	2	4	0,33
			Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelenggaraan Penataan ruang									
			Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota									

				Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Penerbitan Advice planning	370	340	350	350	1	150	840	2,27
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penyelenggaraan Penataan ruang									
				Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota									
				Sub Kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Audit Pemanfaatan Ruang	1	1	1	1	1	1	3	3
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
				Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
				Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pembayaran listrik, air, telepon, BBM, jasa servis, suku cadang,	72	12	12	24	2	12	48	0,67

					perawatan gedung									
					Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
					Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
					Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya perlengkapan kantor	72	12	12	55	4,58	0	67	0,93
					Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
					Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota									
					kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota									

			sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota	Sewa tanah kas desa untuk kepentingan umum	402	400	401	803	2,0025	409	1612	4,0100
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penatagunaan tanah									
			Kegiatan penatagunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/kota									
			Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota	Luas aset Pemda bersertifikat	280	219,62	239,619	40000	166,93	20000	60219,62	215,07
			Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
			Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah									
			Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya jasa dan administrasi keuangan	72	12	12	24	2	12	48	0,67



				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi	72	12	12	48	4	12	72	1
				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	72	12	12	14	1,17	2	28	0,39

			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanan ya Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	72	12	12	33	2,75	19	64	0,89
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
			Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah									
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan bulanan dan semesteran	72	12	12	26	2,17	14	52	0,72

			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota									
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa dan peralatan perkantoran	72	12	12	72	6	48	132	1,83
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan									
			Kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kab/Kota									
			Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan	10	10	10	20	2	10	40	4
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program Redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan									

				maksimum dan tanah Absentee									
				Kegiatan Penetapan subjek dan objek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kab/Kota									
				Sub kegiatan Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	3	10	3	6	2	0	16	5,33
				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
				Program penatagunaan tanah									
				Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota									
				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan penggunaan Tanah	Sertifikasi Tanah Masyarakat	603	0	499	293	0,59	65	358	0,59
				Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									

				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang								
				kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								
				sub kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan tanah ruas bedah menoreh	-	0	100	3	0,03	2	5
				Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar								
				Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan								
				Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								
				Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Adanya kepastian hak tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Kulon Progo	-	3,862	977	400	0,409	100	503,862

			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan									
			Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten									
			Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	-	30	42	30	0,714	30	90	
			Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
			Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan									
			Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten									
			Sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	-	5	3	3	1	3	11	

Kulon Progo,        -        - 2021  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

R. HERİYANTO, S.H., M.M.  
NIP. 19680606 199501 1 001

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya SIPD, sistem MonevKu dan RencanaKu membantu kerja bidang-bidang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu sertifikasi tanah membutuhkan waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai serta belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang pada kondisi tahun 2020 dalam proses usulan ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada tahun 2020 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang Pada tahun 2020 sebesar 88,025% Dengan target 88,00%, maka prosentase capaian sebesar 100,03%.

Analisis pencapaian pada tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 100,36 %, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya.
- 2) Meningkatnya perubahan peruntukan pemanfaatan lahan terkait pembangunan infrastruktur terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta, pasir besi dan Bandara Kulon Progo.

Solusi

1) Meningkatkan koordinasi penataan ruang dan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pelayanan perijinan IMB dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.

2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana struktur dan pola ruang.



b. Prosentase Persentase tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN

Untuk tahun 2020 jumlah tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN 626.381 m<sup>2</sup> dan 1552 bidang. Tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang seharusnya bersertifikat 10.242.452m<sup>2</sup> dan 2451 bidang sedangkan jumlah target 2020 untuk luas tanah aset pemda yang didaftarkan di BPN sebesar 630.776m<sup>2</sup> sehingga realisasi tidak dapat sesuai dengan target yaitu 99,3% sedangkan jumlah bidang tanah kasultanan,kadipaten dan Desa yang didaftarkan di BPN dari Target 1.550 bidang terealisasi 1552 bidang atau 100,06%

Analisis pencapaian pada tahun 2020 sebesar 34,71% dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 sebesar 40,26 %, maka pencapaian pada tahun 2020 sebesar 86,21 %, angka tersebut realistis dan pada akhir Renstra optimis dapat tercapai dengan adanya program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah pusat.

1. Permasalahan

a) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepastian hukum hak atas tanah.

b) Tidak lengkapnya dokumen – dokumen tentang tanah sehingga menghambat proses sertifikasi tanah

2. Solusi

a) Sosialisasi kepada masyarakat

b) Pendampingan kegiatan pemberkasan sertifikasi tanah

c. Rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah

Untuk tahun 2020 rata – rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan akhir Renstra tercapai 96,04 %, dan diperkirakan target akhir Renstra bisa tercapai pada tahun 2022.

1. Permasalahan

a) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia .

2. Solusi

a) Peningkatan kuantitas SDM dari ASN dan Non ASN.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Kulon Progo

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Kesesuaian Ruang			88	88,25	88,5	88,75	87,49	88,25	88,5	88,75	
2.	Persentase Tanah Pemerintah Daerah, Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Desa yang Memiliki Kepastian Hukum			11,24	11,34	11,43	11,53	11,22	11,34	11,43	11,53	

### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam pertanahan dan penataan ruang terdapat beberapa isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Kulon Progo pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah DIY yang sedang berkembang.

Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

- 1). Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/ pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) . Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

- 3). Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaptif dan akuntabel dan penjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- 4). Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- 5). Ditetapkannya Undang-undang keistimewaan dan Perdais tentang Pertanahan.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022:

- Peningkatan Pengawasan dan Identifikasi permasalahan dilapangan sebagai langkah awal pencegahan.
- Penegakan Hukum terkait Agraria dan Tata Ruang sesuai peraturan yang berlaku.
- Peningkatan mutu pelayanan yang berbasis Online di tengah pandemi Covid- 19.

#### **2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**

Rancangan Awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja PD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indicator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.  
Review terhadap RKPD tahun 2022  
Kabupaten Kulon Progo\*

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

RKPD 2021						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Berita Acara Kesepakatan TKPRD untuk RDTR Perkotaan Wates Peta dasar yang terekomendasi oleh BIG untuk RDTR Perkotaan Wates Pra Locket Kementerian ATR untuk RDTR Perkotaan Wates Validasi KLHS RDTR Perkotaan Wates	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	577.95	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Berita Acara Kesepakatan TKPRD untuk RDTR Perkotaan Wates Peta dasar yang terekomendasi oleh BIG untuk RDTR Perkotaan Wates Pra Locket Kementerian ATR untuk RDTR Perkotaan Wates Validasi KLHS RDTR Perkotaan Wates	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	150.000	

2	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	ranperbup RTBL Jangkaran	1 dokumen	286.65	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	ranperbup RTBL Jangkaran	1 dokumen	140.000
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Buku informasi penataan ruang Sosialisasi kebijakan penataan ruang	100 buku 5 lokasi	35.84	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Buku informasi penataan ruang Sosialisasi kebijakan penataan ruang	100 buku 5 lokasi	35.000
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kulon Progo	Rekomendasi pemanfaatan ruang	317 dokumen	86.76	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kulon Progo	Rekomendasi pemanfaatan ruang	317 dokumen	125.000
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Advice Planning	360 dokumen	109.61	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Kulon Progo	Jumlah Dokumen Advice Planning	360 dokumen	65.273
6	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen	63.34	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kulon Progo	Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	1 dokumen	59.712

7	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kulon Progo	Data base fasilitas perdagangan (Pasar) Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	1 dokumen 1 paket	75.57	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kulon Progo	Data base fasilitas perdagangan (Pasar) Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	1 dokumen 1 paket	351.864
8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Tersedianya jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	92.22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kulon Progo	Tersedianya jasa dan peralatan perkantoran	12 bulan	138.753
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	34.30	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kulon Progo	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	64.436
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Terlaksananya Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	12 bulan	94.64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kulon Progo	Terlaksananya Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	12 bulan	77.842
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kulon Progo	Dokumen rencana kerja (Renja) 2023 dan Rencana kerja (Renja) perubahan 2022 SKPD	2 dokumen	10.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kulon Progo	Dokumen rencana kerja (Renja) 2023 dan Rencana kerja (Renja) perubahan 2022 SKPD	2 dokumen	6.343

12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kulon Progo	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan	14 dokumen	22.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kulon Progo	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan	14 dokumen	7.224
13	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kulon Progo	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	21 dokumen	8.33	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kulon Progo	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD	21 dokumen	6.999
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Pembayaran listrik, telepon, air, bbm, jasa servis kendaraan 11 unit dan servis ac sebanyak 7 unit, suku cadang kendaraan sebanyak 11 unit, suku cadang ac sebanyak 9 unit,, perawatan gedung, alat kebersihan, pajak kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 3 unit, sedot wc sebanyak 1 kali.	12 bulan	178.41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kulon Progo	Pembayaran listrik, telepon, air, bbm, jasa servis kendaraan 11 unit dan servis ac sebanyak 7 unit, suku cadang kendaraan sebanyak 11 unit, suku cadang ac sebanyak 9 unit,, perawatan gedung, alat kebersihan, pajak kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 4 sebanyak 3 unit, sedot wc sebanyak 1 kali.	12 bulan	195.496
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Luas asset Pemda yang didaftarkan di BPN (m2)	4000 m2	101.60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Luas asset Pemda yang didaftarkan di BPN (m2)	4000 m2	50.000



16	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kulon Progo	Dokumen identifikasi dan inventarisasi Tanah SG/PAG di 3 Kecamatan, Tanah desa di 3 Kecamatan, dan Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pengadaan Wates baru.	4 dokumen	154.35	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Kulon Progo	Dokumen identifikasi dan inventarisasi Tanah SG/PAG di 3 Kecamatan, Tanah desa di 3 Kecamatan, dan Penyusunan Raperda Dana Cadangan Pengadaan Wates baru.	4 dokumen	180.000
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kulon Progo	Fasilitasi pengurangan luas sertifikat Tanah masyarakat	100 bidang	754.50	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kulon Progo	Fasilitasi pengurangan luas sertifikat Tanah masyarakat	100 bidang	190.000
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan( obyek sewa) Pengadaan tanah Klangon	402 obyek 1 paket	1626.19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kulon Progo	Pembayaran sewa Tanah Desa yang dilaksanakan( obyek sewa) Pengadaan tanah Klangon	402 obyek 1 paket	13.021.408
19	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kulon Progo	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan	10 masalah	82.69	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Kulon Progo	Jumlah masalah pertanahan yang diselesaikan	10 masalah	60.000

20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Pembangunan Landscape Kantor 1 paket, Motor 2 unit, Almari arsip 7 buah, Filling cabinet 4 buah, Kursi tunggu 2 buah, Meja kursi tamu pimpinan 1 set, Meja kursi tamu staf 1 set	1 Paket	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kulon Progo	Pembangunan Landscape Kantor 1 paket, Motor 2 unit, Almari arsip 7 buah, Filling cabinet 4 buah, Kursi tunggu 2 buah, Meja kursi tamu pimpinan 1 set, Meja kursi tamu staf 1 set	1 Paket	318.237	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.394.479	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kulon Progo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.394.479	

## 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Pertanahan, Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Perumahan, Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2022. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2022.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik Perubahan RPJMD 2017-2022, tema dan prioritas pembangunan 2022 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2022 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Pertanahan dan Penataan Ruang ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kulon Progo bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Kulon Progo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat	Desa Wahyuharjo	Memerlukan status tanah Kas Kalurahan yang jelas	Koefisien : 1 bidang Anggaran : 3000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
2	Updating dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	Desa Wahyuharjo	Memerlukan inventarisasi dan identifikasi tanah untuk kepentingan umum, serta membutuhkan Serat Kekancingan dan Hak Anggaduh atas Tanah Kas Kalurahan dari Kasultanan	Koefisien : 6 bidang Anggaran : 6000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
3	Fasilitasi sertifikasi tanah masyarakat	Desa Purwosari	Perlunya PTSL/penyertifikatan tanah warga	bukan kewenangan Dinas PTR KP tetapi merupakan kewenangan BPN KP. Koefisien : 250 Bidang Anggaran : 250000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota
4	Updating dokumen identifikasi dan inventarisasi pertanahan	Desa Ngargosari	Kegiatan Pengurusan Surat Ijin Kasultanan/ Serat Kekancingan Tanah Kalurahan	Koefisien : 1 bidang Anggaran : 1000000	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten /Kota

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang agraria dan tata ruang umum skala nasional serta sasaran strategis nasional

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
2. Sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019, dirumuskan sebagai berikut :
  - 1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
  - 2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  - 3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mendukung misi ke-4 (Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2022 adalah **“Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah”**. Tahapan pembangunan diarahkan untuk mengembangkan pembangunan kawasan yang lain dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya dengan lebih diarahkan pada pengembangan fungsi kawasan, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya keistimewaan Yogyakarta.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tujuan dan sasaran rancangan akhir rencana kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase Tanah Pemerintah Daerah, tanah Kasultanan, Kadipaten dan Desa yang sudah terdaftar di BPN	40,26
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	89,55

### 3.1. Program dan Kegiatan

Secara umum Sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dijabarkan di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2022 ini. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2022 dengan 8 Program dari APBD sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Umum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Administrasi Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB V  
PENUTUP**



Dengan melihat latar belakang keterbatasan semua sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, peralatan, pendanaan maupun dengan melihat berbagai tantangan meliputi tantangan kondisi fisik geografis Kulon Progo yang berbukit-bukit dan relatif labil serta rawan bencana, kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, menyebabkan target Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tugas yang harus diemban Bupati, belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang, diperlukan rangkaian sosialisasi dan monitoring kegiatan pembangunan yang lebih intensif di seluruh wilayah dan memberikan papan-papan petunjuk mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sempadan Bangunan di seluruh pelosok wilayah.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2022, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wates, Juli 2021  
Kepala

**R. HERIYANTO, SH. M.M**  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19680606 199501 1001